

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
2022		
PERDA NO 1, LD 90/TLD 91, 136 HLM.		
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
ABSTRAK	-	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
	-	Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2008, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 56 Tahun 2005, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 5 Tahun 2009, PP Nomor 69 Tahun 2010, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 18 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Perpres Nomor 61 Tahun 2019, Permendagri Nomor 52 Tahun 2012, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 33 Tahun 2019, Permendagri Nomor 54 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 9 Tahun 2021, Perda KKA Nomor 2 Tahun 2011, Perda KKA Nomor 3 Tahun 2011, Perda KKA Nomor 3 Tahun 2012, Perda KKA Nomor 7 Tahun 2016.
	-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi Pengelola Keuangan Daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), penyusunan Rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi semester pertama apbd dan perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan Daerah dan utang Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian Keuangan Daerah, informasi Keuangan Daerah dan pembinaan dan pengawasan.
CATATAN	:	- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Maret 2022 dan ditetapkan tanggal 3 Maret 2022
	-	Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.